

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN
“MAPPADECENG” DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN SOPPENG**

***POLICY IMPLEMENTATION OF THE "MAPPADECENG"
MOVEMENT PROGRAM IN EDUCATION IN
SOPPENG REGENCY***

TRI CAHYO NUGROHO

E012182006



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN
“MAPPADECENG” DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SOPPENG**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

TRI CAHYO NUGROHO

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

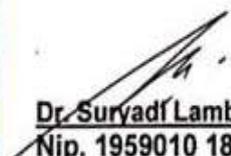
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN
"MAPPADECENG" DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan diajukan oleh
TRI CAHYO NUGROHO
Nomor Pokok E012182006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **28 Januari 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Suryadf Lambali, M.A
Nip. 1959010 18 198503 1 006

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,


Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.
Nip. 19601231 198601 1 005

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Hamsinah, M.Si.
Nip. 19551103 198702 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Tri Cahyo Nugroho

Nomor Mahasiswa : E012182006

Program Studi : Administrasi Publik

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Implementasi Kebijakan Program Gerakan "Mappadeceng" Dalam Bidang
Pendidikan Di Kabupaten Soppeng

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

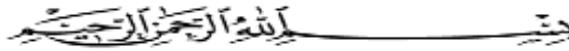
Makassar, 28 Januari 2021

Yang menyatakan,



Tri Cahyo Nugroho

PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya serta ucapan shalawat serta salam yang selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan selesainya tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Gerakan Mappadeceng Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng”.

Tulisan ini dilatari tajak permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Soppeng dan dengan adanya kebijakan Bupati Soppeng mengenai program gerakan Mappadeceng sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banyak kendala yang ditemui oleh penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya, maka dari itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda yaitu Sulham sebagai sosok laki-laki yang menjadi inspirasi dalam kehidupan penulis dan Ibunda tercinta yaitu Munirah sebagai sosok wanita yang menjadi penyejuk dan penenang hati penulis, saudara/saudari yaitu Heru Pryono dan Hamriani yang telah banyak membantu serta pembimbing penulis yaitu Dr. Suryadi Lambali, M.A dan Prof. Dr. Hamsinah, M.Si yang telah meluangkan sebagian waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan arahan yang sangat penting kepada penulis mulai dari pengembangan

minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitian dan sampai dengan penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dewan penguji yang terhormat atas masukan, kritikan dan sarannya dalam perbaikan tesis ini yakni, Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P., Bapak Dr. Badu Ahmad, M.Si dan Ibu Dr. Syahribulan, M.Si. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah swt. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si selaku Ketua Program Studi S2 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terkhusus kepada seluruh dosen Departemen Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala arahan dan bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan terkhusus kepada staf sekretariat

Pascasarjana atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis.

5. Kepala BKPMMD Prov. Sul-Sel, Bupati Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuptaen Soppeng, Kantor Kelurahan Cabenge dan Kantor Desa Paroto yang telah bekerja sama dan membantu dalam proses pengumpulan data selama saya melakukan penelitian.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bentuk perhatian serta bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah SWT dan semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu admnistrasi publik khususnya dalam kajian kebijakan publik, mahasiswa ilmu administrasi publik maupun pihak-pihak lain terutama bagi penulis sendiri. Atas segala kekurangan dan keterbatasan di dalamnya, penulis memohon maaf. Terima kasih.

Makassar, 28 Januari 2021

Tri Cahyo Nugroho

ABSTRAK

TRI CAHYO NUGROHO. *Implementasi Kebijakan Program Gerakan "Mappadeceng" dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng* (dibimbing oleh Suryadi Lambali dan Hamsinah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan *mappadeceng* dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Wawancara dilakukan terhadap tiga belas informan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Kelurahan Cabenge, dan Desa Paroto. Dalam melihat aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi para pelaksana, dan komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dianalisis dengan tiga tahapan (pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum memiliki indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan kebijakan; sumber daya yang dimiliki cukup memadai; karakteristik agen pelaksana telah memiliki tugas sesuai SK; para pelaksana menyikapi dengan serius kebijakan tersebut; komunikasi antarorganisasi belum maksimal; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik cukup kondusif; serta faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan program *mappadeceng* meliputi belum jelasnya ukuran keberhasilan kebijakan serta sosialisasi dan koordinasi yang belum maksimal, sehingga implementasi kebijakan program gerakan *mappadeceng* dalam bidang pendidikan belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pendidikan, *mappadeceng*



ABSTRACT

TRI CAHYO NUGROHO. *Policy Implementation of The "Mappadeceng" Movement Program in Education in Soppeng Regency* (Supervised by **Suryadi Lambali** and **Hamsinah**)

This study aims to determine the implementation of "Mappadeceng" policies in the education sector in Soppeng Regency.

This research was qualitative research using descriptive approach. Interviews were conducted to 13 informants at the Education and Culture Office of Soppeng Regency, Cabenge Village and Paroto Village. In looking at the aspects of size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition of executors, communication between organizations, and the economic, social and political environment, it was analyzed by three stages (that were data reduction, data presentation and drawing conclusions).

The results show that the measures and objectives of the policies do not have clear indicators in measuring the success of policies; its resources are quite adequate; characteristics of the executing agent having assigned duties based on the decree; the implementers take the policy seriously; communication between organizations is not optimal; the economic, social and political environment is quite conducive, as well as factors that influence the implementation of Mappadeceng program policies including unclear measures of the success of policies, socialization and coordination that have not been maximized, so that the implementation of program policies for the "Mappadeceng" movement in the education sector has not been carried out properly.

Keywords: Policy Implementation, Education, Mappadeceng



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Program Pendidikan.....	11

1. Definisi program	11
2. Definisi pendidikan	12
3. Jenjang pendidikan	15
4. Jenis program pendidikan	16
5. Fungsi pendidikan	19
6. Unsur pendidikan	20
7. Tujuan pendidikan.....	22
8. Kebijakan pendidikan	25
B. Kebijakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan	26
1. Maksud gerakan Mappadeceng.....	28
2. Tujuan gerakan Mappadeceng	28
3. Sasaran.....	29
4. Pola pembinaan melalui Pola Tiga Gerakan Mappadeceng (TriGema).....	29
C. Tinjauan Umum Kebijakan Publik.....	30
1. Definisi Kebijakan Publik.....	30
2. Karakteristik Kebijakan Publik.....	32
3. Proses Kebijakan Publik	34
4. Model Teori Analisis Kebijakan	37
D. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan	39

1. Definisi Implementasi Kebijakan	39
2. Model Implementasi Kebijakan	45
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi	57
E. Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu	59
F. Kerangka Pikir	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Peneltian	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
C. Deskripsi Fokus Penelitian	65
D. Informan	68
E. Teknik Pengumpulan Data	71
1. Data Primer	71
2. Data Sekunder	72
F. Instrumen Penelitian.....	72
G. Teknik Analisis Data	73
1. Reduksi data (<i>Data reduction</i>)	74
2. Penyajian data (<i>Data display</i>)	74
3. Penarikan kesimpulan (<i>Conclusion drawing/verification</i>)	74
H. Keabsahan Data.....	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.....	76
2.	Kelurahan Cabenge	90
3.	Desa Paroto	92
B.	Hasil Penelitian.....	95
1.	Implementasi Kebijakan Program Gerakan Mappadeceng Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng	96
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Gerakan MAPPADECENG Dalam Bidang Pendidikan	150
C.	Pembahasan	157
1.	Implementasi Kebijakan Program Gerakan Mappadeceng Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Soppeng	158
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Gerakan Mappadeceng Dalam Bidang Pendidikan	178
D.	Keterbatasan Penelitian	182
BAB V PENUTUP		184
A.	Kesimpulan.....	184
B.	Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA.....		188

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hubungan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Tesis	58
2. Agen Pelaksana Program Gerakan Mappadeceng	69
3. Informan Kelompok Sasaran Kebijakan program Mappadeceng....	70
4. Daftar pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berdasarkan golongan.....	86
5. Daftar pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng berdasarkan jenjang pendidikan.....	87
6. Daftar guru SD Kabupaten Soppeng	87
7. Daftar guru SMP Kabupaten Soppeng	88
8. Daftar guru SD dan SMP Kabupaten Soppeng	89
9. Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Cabenge	91
10. Jumlah penduduk dalam interval usia	94
11. Laporan kegiatan pelaksanaan gerakan Mappadeceng.....	99
12. Kegiatan dalam implementasi kebijakan program gerakan Mappadeceng.....	105
13. Tim pelaksana gerakan Mappadeceng.....	110
14. Besaran beasiswa yang diterima peserta didik.....	113
15. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Cabenge	142
16. Mata pencaharian penduduk Desa Paroto	142
17. Kasus kriminal di Kelurahan Cabenge dan Desa Paroto	146

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Tahapan-tahapan Kebijakan Publik.....	37
2. Kerangka Konsep Penelitian	63
3. Komponen Dalam Analisis Data	73
4. Struktur Organisasi.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Informed Consent*
2. Lembar observasi
3. Telaah dokumen
4. Dokumen Terkait Kebijakan Program Gerakan Mappadeceng
5. Dokumentasi Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KLA	Kabupaten Layak Anak
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PIP	Program Indonesia Pintar
PNF	Pendidikan Non Formal
PPDB	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
PT	Perguruan Tinggi
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SOP	Standar Oprasional Prosedur
Trigema	Tiga Gerakan MAPPADECENG
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap Negara. Kesejahteraan merupakan konsep yang dapat diukur dari berbagai indikator dan sudut pandang yang berbeda baik dilihat dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan tolak ukur untuk menilai apakah Negara tersebut merupakan Negara yang dikategorisasikan sebagai Negara maju atau berkembang.

Dalam mewujudkan kesejahteraan, Pemerintah merupakan instrumen yang berperan penting di dalam Negara yang berfungsi untuk mengatur maupun mengelola berbagai sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Didalamnya disebutkan bahwa pemerintah harus memenuhi hak-hak dasar warga Negara agar dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya (Republik Indonesia, 1945).

Hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global dengan tujuan untuk mengakhiri berbagai permasalahan di dunia. Salah satu prinsipnya yaitu *universality* yang diartikan bahwa semua Negara harus patuh dan melaksanakan prinsip-prinsip SDGs yang

telah ditetapkan agar tidak ada lagi yang disebut sebagai Negara tertinggal.

Indikator SDGs terdiri beberapa aspek, salah satunya adalah perihal pendidikan yaitu pendidikan bermutu. Di Indonesia, ditargetkan bahwa pada tahun 2030 setiap indikator SDGs sudah tercapai. Adanya target yang telah ditetapkan mengharuskan pemerintah untuk mencapai target tersebut dengan menetapkan kebijakan sebagai jalan untuk mencapai target tersebut.

Komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga Negara sejalan dengan kesepakatan pembangunan global sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakannya. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan agar tidak terjadi ketimpangan yang dapat menimbulkan hambatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. Hak-hak tersebut terdiri dari beberapa aspek, salah satu yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Mengupayakan perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan; Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta jaminan kesejahteraan tenaga

kependidikan agar tenaga pendidik mampu melaksanakan fungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan; Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik yang heterogen, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

Selanjutnya, memberdayakan institusi pendidikan pada sekolah maupun di luar sekolah sebagai pusat membangun budaya nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi dan menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif dalam seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara maksimal disertai dengan hal dukungan dan perlindungan yang disesuaikan dengan potensinya (Republik Indonesia, 2003).

Masyarakat diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan semenjak berusia tujuh sampai lima belas tahun hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 6 aturan ini diadakan karena kehendak UUD NKRI 45 pasal 31 yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib mendapatkan pendidikan, selain itu pemerintah juga wajib membiayainya agar tercipta sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat.

Pendidikan nasional juga sebagai pranata sosial di dalam memberdayakan masyarakat Indonesia guna meningkatkan kualitas masyarakat agar mampu menjawab tantangan zaman serta proaktif dalam menghadapi keadaan yang selalu berubah yang disertai dengan kompleksitas yang tinggi. Sehingga pendidikan harus menjadi perihal yang dielaborasi pemerintah secara berkelanjutan.

Asas penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan di dalam pasal 3 ayat 1 salah satunya adalah pendidikan sepanjang hayat yang menegaskan bahwa proses pendidikan tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, pengembangan budaya menulis, membaca dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pengendalian layanan mutu (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah dalam menyiapkan segala perangkat aturan akan tetapi disisi lain juga memerlukan kesadaran maupun keseriusan masyarakat karena semua *stakeholders* harus bersatu padu sebagai pemicu dalam mengupayakan pelaksanaan pendidikan yang efektif. Seluruh elemen-elemen yang ada dimulai pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sampai pada unit-unit teknis harus menjalin koordinasi yang baik agar proses pendidikan terlaksana dengan baik.

Langkah taktis yang diambil pemerintah di dalam bidang pendidikan yaitu adanya program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berarti seluruh anak di Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan dasar sampai menengah. Diharapkan dengan adanya program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah.

Dengan adanya kebijakan tersebut tidak serta merta mampu menghilangkan angka putus sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa pada tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun ajaran 2018/2019 terdapat anak putus sekolah di Indonesia yang berjumlah 57.426 orang sedangkan di Sulawesi Selatan anak putus sekolah pada tingkat SD berjumlah 3.066 orang (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, 2019). Berdasarkan data bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng bahwa pada tahun 2019/2020 angka putus sekolah SD/Sederajat sebanyak 161 orang siswa.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kemendikbud merilis jumlah siswa(i) SMP yang putus sekolah di Indonesia sebanyak 85.545 orang dan Sulawesi Selatan sebanyak 3.391 orang, sedangkan data bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng bahwa pada tahun 2019/2020 angka putus sekolah SMP/Sederajat sebanyak 347 siswa.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta didik semakin lama semakin berkurang, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah siswa(i) yang putus sekolah sehingga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan dan menghambat program pengentasan kemiskinan karena penyebab anak putus sekolah dapat dipengaruhi oleh banyak hal dan salah satunya adalah faktor kemiskinan.

Isu strategis bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 meliputi akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah; belum optimalnya aksesibilitas pendidikan; masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendahnya kesadaran maupun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus

sekolah; dan rendahnya ekonomi keluarga (Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, 2016).

Adanya beberapa isu sentris mengenai pendidikan di atas membuat Kabupaten Soppeng masih diperhadapkan oleh beberapa kendala dalam bidang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini akan menjadi penentu arah kebijakan pemerintah daerah di dalam melakukan perbaikan di dalam bidang pendidikan.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan wewenang kepada Kepala Daerah dalam mengelolah dan mengatur wilayahnya sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Soppeng berinisiatif melakukan pengentasan kemiskinan yang meliputi peningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban serta pemenuhan hak-hak dasar warga Negara melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Mappadeceng (Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, 2018).

Istilah Mappadeceng berasal dari bahasa bugis yang memiliki arti “memperbaiki”, jadi Mappadeceng diartikan sebagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gerakan Mappadeceng mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Soppeng untuk bertanggungjawab membina masyarakat yang dinilai masih berada di bawah garis kemiskinan. Kebijakan program Mappadeceng harus memiliki ukuran dan tujuan yang jelas sehingga

setiap instansi mampu menerjemahkan sesuai dengan peruntukan kebijakan tersebut. Disamping itu, ketersediaan sumber daya yang memadai dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan harus ada komunikasi antar organisasi yang terkait sehingga memudahkan dalam melaksanakan kebijakan serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang terdiri ekonomi, sosial dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN “MAPPADDECENG” DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOPPENG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka peneliti hendak mengetahui tentang implementasi kebijakan program Mappadeceng dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng agar dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam melakukan perbaikan pada bidang pendidikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program gerakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan program gerakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memerlukan tujuan agar dapat mengetahui arah dan apa saja yang hendak diketahui oleh penelitian tersebut, sehingga memiliki ruang lingkup yang jelas. Adapun beberapa tujuan di dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program gerakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program gerakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan di Kabupaten Soppeng?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Adapun manfaat yang dimaksud sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan di dalam perkembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam hal kebijakan publik serta menjadi acuan untuk melakukan kajian tentang implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara positif untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dan menjadi bahan acuan untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Soppeng khususnya yang menjadi ruang lingkup urusan pendidikan berdasarkan otonomi Daerah

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada seluruh *stakeholders* dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Soppeng khususnya para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng dalam melakukan perbaikan pada bidang pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Program Pendidikan

1. Definisi program

Program merupakan tindak lanjut dalam menjalankan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan pada kebijakan yang telah dibuat. Definisi program termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa: Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat isi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran serta tujuan agar memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Lebih lanjut, program juga disebut sebagai rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara berkesinambungan agar program tersebut dapat tercapai. Pelaksanaan program terjadi di dalam sebuah organisasi serta melibatkan seluruh *stakeholders* (Arikunto, 2004:1). Keputusan yang dijalankan secara bersama berdasarkan kesepakatan tentang indikator tertentu di dalam pelaksanaannya kemudian berisikan pernyataan kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan berkaitan, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program

mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin & Prabowo, 2009: 349).

Program pendidikan adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa instrumen dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan secara nasional (Ananda, 2016: 9).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka program pendidikan dapat dikatakan sebagai rangkaian tujuan tentang pendidikan dan melibatkan seluruh *stakeholders* yang didalamnya terdiri beberapa instrumen serta indikator keberhasilan sebagai parameter program yang dilakukan secara kontinu.

2. Definisi pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau mengubah perilaku manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan sebagai usaha yang secara sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan setiap individu kepada dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan dapat ditempuh melalui

lembaga yang telah disiapkan oleh Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tahapan pendidikan akan membentuk pengetahuan secara sistematis diri seseorang kepada orang lain sesuai standar. Adanya proses transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengubah sikap, perilaku, metode berpikir dan kedewasaan kepribadian (Moses, 2012: 22-23). Sedangkan Triyanto (2014: 23-24) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup manusia sebagai optimalisasi kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup yang dijalani.

Menurut Djumali *et al.*, (2004:1) menyebutkan pendidikan adalah proses pembekalan dalam mempersiapkan manusia untuk memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun yang akan datang. Secara lebih luas pendidikan juga disebut sebagai pengembangan pribadi dalam semua aspek, apakah pada aspek lingkungan, jasmani, akal, maupun hatinya maka dari itu pendidikan bukan hanya sekedar meningkatkan

kecerdasan intelektual seseorang tapi juga harus mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya (Tafsir, 2006: 14).

Pertumbuhan dan perkembangan potensi manusia dilakukan melalui pengajaran (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*) untuk mendapatkan serta meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan atau keterampilan (*skill*) agar berperilaku (*behavior*) yang baik dan bermanfaat terhadap kehidupan dirinya, masyarakat, ataupun lingkungannya (Azis, 2011: 71).

Secara rinci pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga definisi yang meliputi:

a. Definisi secara luas

Pendidikan merupakan proses hidup. Segala pengalaman yang dilalui adalah pelajaran dan berlangsung di dalam lingkungan serta berjalan sepanjang hidup seseorang. Pendidikan adalah situasi hidup dimana keadaan akan mempengaruhi pertumbuhan individu.

b. Definisi secara sempit

Pendidikan merupakan lembaga sekolah. Segala tindakan yang diupayakan sekolah untuk mempengaruhi sebagai pemicu peserta didik agar memiliki kemampuan serta kesadaran penuh terhadap relasi dan tugas sosial yang dijalani.

c. Definisi alternatif

Pendidikan adalah usaha yang secara sadar dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Usaha tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat
(Mudyahardjo, 2012: 3).

3. Jenjang pendidikan

Tempat menempuh jalur pendidikan telah disebutkan oleh pemerintah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi. Pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dilaksanakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, warga Negara yang berumur enam tahun memiliki hak mengikuti pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang ditempuh pada Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) .

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, pendidikan menengah ditempuh dengan kurun waktu setelah menyelesaikan pendidikan dasar.

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan diploma: Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

4. Jenis program pendidikan

Jalur pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan fokus kepada tujuan yang hendak dicapai yang didasari oleh minat seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 9, menyebutkan jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Tirtarahardja & Sulo (2005: 264-266) membagi jalur pendidikan kedalam beberapa jenis yang meliputi:

a. Pendidikan Umum

Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat pendidikan. Pendidikan umum sebagai acuan bagi jenis pendidikan lainnya, pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan Universitas/Pendidikan Tinggi.

b. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dipersiapkan kepada peserta didik agar dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, jasa boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran dan lain-lain. Lembaga pendidikan kejuruan meliputi, STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA.

c. Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang disabilitas atau kelainan fisik dan mental. Pendidikan luar biasa adalah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus yaitu program untuk anak tuna netra, tuna rangu, dan tuna daksa serta tunagrahita. Untuk

pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma III.

d. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi calon pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan meliputi pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi.

e. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Misalnya pendidikan dasar misalnya madrasah ibtidaiyah, pendidikan menengah seperti tsanawiyah, PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) dan yang pendidikan tinggi seperti Sekolah theoliga, IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan IHD (Institut Hindu Dharma).

f. Pendidikan dalam Islam

Islam mendorong pemeluknya untuk mencari ilmu pengetahuan kapan dan dimana pun. Kedudukan pakar ilmu pengetahuan ditempatkan pada peringkat yang tinggi. Al-qur'an menyebutkan

orang-orang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 31, surah Al-Zumar ayat 9, dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat diwajibkan di dalam Islam.

5. Fungsi pendidikan

Pendidikan memiliki fungsi untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam setiap aspek diri seseorang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan fungsi pendidikan meliputi: Pendidikan secara nasional sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan individu menjadi manusia, mempersiapkan tenaga kerja dan mempersiapkan warga negara yang baik.

Proses pendidikan sebagai persiapan tenaga kerja dapat diartikan bahwa dengan melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan dan mengasah kemampuannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab yang ketika telah mendapatkan pekerjaan nantinya. Fungsi tersebut hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang diselenggarakan pada pendidikan sekolah

(pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal).

6. Unsur pendidikan

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi hal-hal yang saling berkaitan satu dengan lainnya sedangkan Triyanto (2014: 24-26) menyebutkan unsur-unsur pendidikan meliputi:

- a. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat pola interaksi antara pendidik dan peserta didik.
- c. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti program pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

- d. Pendidik adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang bidang tertentu. Kualifikasi tenaga pendidik meliputi: guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- e. Interaksi edukatif adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang ditunjang oleh sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. Isi pendidikan memuat materi-materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara kearah yang lebih baik lagi.
- g. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang berinteraksi membangun hubungan yang tersistematis sehingga kemampuan yang dimiliki dapat terus diupayakan kearah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dijabarkan dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Notoatmodjo (2003:16) hanya membagi tiga unsur-unsur pendidikan yang meliputi:

- a. Input yaitu sasaran pendidikan dan pendidik (pelaku pendidikan).

- b. Proses yaitu upaya yang direncanakan melalui interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan yang didasari oleh kurikulum yang ada.
- c. Output yaitu tentang apa yang akan dicapai atau perilaku.

7. Tujuan pendidikan

Tujuan lain pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki tujuan khusus menurut Yamin (2012:17) adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan insidental, keinginan yang hendak di capai dalam setiap proses kegiatan pendidikan.
- b. Tujuan instruksional, keinginan yang hendak dicapai dalam satuan rangkaian kegiatan pendidikan.
- c. Tujuan kurikuler, keinginan yang hendak dicapai dalam suatu lingkup isi dan jenis pendidikan.
- d. Tujuan institusional, keinginan yang hendak dicapai dalam setiap dan jenjang kegiatan dalam pendidikan (SD, SMP, SMA, PT dan seterusnya).

- e. Tujuan tahapan perkembangan meliputi peningkatan kemampuan spiritual, intelektual, moral dan sebagainya.
- f. Tujuan temporer pendidikan di sekolah yaitu capaian setiap tahapan perkembangan peserta didik, seperti pada masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.

Secara umum tujuan pendidikan di sekolah yaitu menekankan pada proses, dalam ranah fungsional pendidikan di artikan sebagai proses sosial, proses individualisasi atau personalisasi, dan proses humanisasi. Pendidikan memiliki teori khusus yang di maksudkan adalah mengenai studi keilmuan pendidikan. Menurut Suhartono (2008: 101) Studi keilmuan di sekolah meliputi studi pendidikan , antara lain sebagai berikut :

- a. Pedagogik, merupakan studi keilmuan pendidikan yang mencakup unsur-unsur mengenai tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, hubungan pendidikan, alat, dan lingkungan pendidikan.
- b. Ortopedagogik, merupakan studi ilmiah pendidikan khusus yang diperuntukkan kepada anak remaja yang menyandang kelainan fisik, mental atau pun perilaku.
- c. Psikologi pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan tentang individu mengenai pembahasan yang bersangkutan dengan proses belajar siswa, proses mengajar, evaluasi, dan kebutuhan-kebutuhan sosial.
- d. Sosiologi pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai faktor-faktor sosial yang meliputi pembahasan yang bersangkutan

dengan struktur sosial, proses sosial, perilaku sosial, dan kontrol sosial.

- e. Ilmu pendidikan kependudukan, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai keadaan demografi pendidikan sebagai pertimbangan dalam peningkatan kualitas kehidupan dengan tanpa merusak lingkungan hidup.
- f. Androgogik, merupakan studi ilmiah tentang kependidikan yang dapat membantu orang dewasa dalam proses pembelajaran.
- g. Antropologi pendidikan, merupakan studi ilmiah tentang aspek kebudayaan dalam pendidikan. Dalam arti luas menekankan pada cara-cara bagaimana proses belajar dan mengajar dalam hubungannya dengan kebudayaan tertentu yang dianut. Dalam arti sempit, antropologi pendidikan adalah studi tentang peranan sekolah dan para guru sekolah dalam hal proses belajar mengajar yang berhubungan dengan kebudayaan tertentu.
- h. Ekonomi pendidikan, merupakan studi ilmiah pada aspek ekonomi yang meliputi seluruh kegiatan pendidikan, khususnya mengenai persoalan tentang bagaimana hubungan antara ekonomi dan sistem pendidikan.
- i. Politik pendidikan, merupakan studi ilmiah pendidikan tentang aspek politik dalam kegiatan pendidikan, biasa juga dikatakan sebagai studi ilmiah pendidikan tentang kebijakan dalam pendidikan.

- j. Ilmu administrasi pendidikan di sekolah, merupakan studi ilmiah pendidikan mengenai aspek bagaimana cara mengatur dan mengelola pelaksanaan pendidikan menurut kebijakan pendidikan yang telah dibentuk. Studi ini menekankan pada proses integrasi usaha-usaha personil pendidikan dengan pengguna peralatan serta perlengkapan secara efektif dan efisien dalam rangka pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia.

8. Kebijakan pendidikan

Pelaksanaan pendidikan memerlukan kebijakan untuk mengatur, mengontrol dan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan tentang langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan ke dalam visi, misi pendidikan, sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (Tilaar & Nugroho, 2008: 140).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi pada kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam mewujudkan pendidikan yang hendak dicapai (Rohman, 2014: 108).

Lebih lanjut Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan meliputi tentang efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Isu ini menjadi penting dengan meningkatkannya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai bagian kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus searah dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan tentang pembangunan. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara bangsa di bidang pendidikan (Tilaar & Nugroho, 2008: 37).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi pada kebijakan publik. Kebijakan pendidikan mengatur hal mengenai bagaimana mengelola dan mengalokasikan setiap sumber daya yang ada di dalam pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien

B. Kebijakan Mappadeceng dalam bidang pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2018 tentang gerakan Mappadeceng ini, dijelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk membina bidang teknis yang diembannya agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ditengah-tengah mereka.

Bidang pendidikan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah bidang

pendidikan. Jadi pemerintah daerah harus menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aturan sistem pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi tersebut dianggap akan mampu sehingga melahirkan warga negara yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Memiliki prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dalam suatu sistem.

Adanya kebijakan program Mappadeceng dianggap mampu memperbaiki pelaksanaan pendidikan yang ada di Kabupaten Soppeng dan menjalankan proses pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip sistem

pendidikan nasional yang telah diatur serta meningkatkan mutu pendidikan baik segi *input* ataupun *outputnya* berdasarkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1. Maksud gerakan Mappadeceng

- a. Untuk mengidentifikasi permasalahan dan persoalan kemiskinan dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan;
- b. Untuk memberikan solusi dari permasalahan melalui kegiatan dengan pola tri gerakan Mappadeceng (tri gema), yaitu gema manusia, gema lingkungan dan gema usaha; dan
- c. Sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng dengan mensinergikan program SKPD dan pemerintah desa dengan perbankan, bumh/bumd, LSM, perguruan tinggi, pengusaha dan tokoh masyarakat.

2. Tujuan gerakan Mappadeceng

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Soppeng di semua tingkatan pemerintahan dalam mengkoordinasikan penanganan penanggulangan kemiskinan;
- b. Memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan; dan
- c. Mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan dan sasaran program

penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

3. Sasaran

Sasaran dari Gerakan Mappadeceng Soppeng adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang termuat dalam Basis Data Terpadu sehingga gerakan tersebut tepat sasaran dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng.

4. Pola pembinaan melalui Pola Tiga Gerakan Mappadeceng (TriGema)

- a. Gema Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pengetahuan, peningkatan derajat kesehatan dan pengembangan bakat dan keterampilan serta perubahan pola pikir.
- b. Gema Lingkungan melalui mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan masyarakat miskin, peningkatan infrastruktur lingkungan agar dapat menjalankan kehidupan dan kegiatan usahanya dengan aman, sehat dan nyaman.
- c. Gema Usaha dengan meningkatkan keterampilan masyarakat atau kelompok dan menciptakan wirausaha baru dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat dan potensi daerah atau lingkungan sekitarnya sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga masalah publik dapat ditangani berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pengertian dan substansi mengenai kebijakan telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena yang sangat kompleks serta kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini juga yang mempengaruhi para ahli di dalam mendefinisikan perihal kebijakan. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah dan tindakan yang mempunyai maksud berdasarkan ketetapan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu (Nugroho, 2009: 83).

Kemudian kebijakan publik menurut Eyestone (2004) dalam Wahab (2012: 13) adalah “*the relationship of government unit to its environment*” (hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya). Chandler dan Plano menyebutkan kebijakan publik

adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan pemerintah. Bahkan lebih rinci Chandler dan Plano memiliki anggapan bahwa: kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang *continue* oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan (Pasolong, 2013: 38).

Sedangkan kebijakan publik menurut Anderson (1975) dapat diklasifikasikan sebagai proses *management*, yang didalamnya terdapat beberapa fase tentang serangkaian kerja pejabat publik ketika pemerintah benar-benar bertindak untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* ketika kebijakan publik yang diambil bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segal sesuatu masalah) atau negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu) (Tangkilisan, 2003: 2).

Kebijakan menurut Thomas R. Dye (1981) menyebutkan kebijakan publik sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang dan hak untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik (Tangkilisan, 2003: 1).

Easton (1969) menyebutkan kebijakan publik sebagai suatu proses *management*, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk

melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (Tangkilisan, 2003: 2).

Kebijakan publik disebutkan oleh Laswell dan Kaplan sebagai suatu program yang dapat diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*) (Nugroho, 2012: 119).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah dalam hal mengelola dan menata Negara tanpa mengenyampingkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip peraturan yang ada.

2. Karakteristik Kebijakan Publik

Cakupan kebijakan publik sangatlah luas sehingga terdapat karakteristik tersendiri di dalamnya. Agustino (2008: 6) membagi karakteristik kebijakan publik berdasarkan definisinya, yaitu:

- a. Pada umumnya fokus kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan,

mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

- d. Kebijakan publik dapat dinilai ke dalam bentuk positif maupun negatif. Secara positif yaitu tindakan pemerintah dapat dilihat atau diukur dengan jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada aturan di atasnya dan merupakan tindakan yang bersifat memperbaiki.

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, sedangkan merumuskan masalah merupakan tahapan dalam merumuskan kebijakan, sehingga penentuan masalah merupakan pokok dalam pembuatan kebijakan, akan tetapi kadang kala gesekan antara kebijakan tidak dapat dihindari oleh para perumus kebijakan. Dunn (2003: 214-216) menjelaskan beberapa ciri penting masalah kebijakan sebagai berikut:

- a. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang terkadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam Dunn mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan

merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah.

- b. Subyektivitas masalah kebijakan. Kondisi eksternal menimbulkan suatu permasalahan yang dapat didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
- c. Sifat Buatan terhadap masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika pengambil kebijakan membuat penilaian tentang keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif yang dilakukan oleh manusia; bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah terhadap kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Banyak solusi yang dapat ditawarkan tentang mengatasi masalah dan banyak pula definisi yang berbeda tentang permasalahan. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan; dan karenanya masalah tidak pula secara konstan terpecahkan.

3. Proses Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Dunn (2003: 24) terdapat beberapa tahapan yang dipandang perlu untuk dilakukan,

meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahapan ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penjelasan tahapan perumusan kebijakan publik sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda adalah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas perumusan kebijakan publik. Proses adalah ruang untuk memaknai apa yang dapat disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang didiskusikan. Jika isu tersebut berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain dan menjadi isu prioritas dibanding dengan isu lainnya. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder dan menjadi agenda untuk para perumus kebijakan

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang

terbaik. Solusi yang dihasilkan berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif yang telah terpilih kemudian akan diadopsi dengan dukungan oleh mayoritas legislatif atau konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Tujuan adopsi adalah untuk mendapatkan legitimasi agar dapat memberikan otoritas penuh pada proses dasar pemerintahan.

d. Tahap implementasi kebijakan

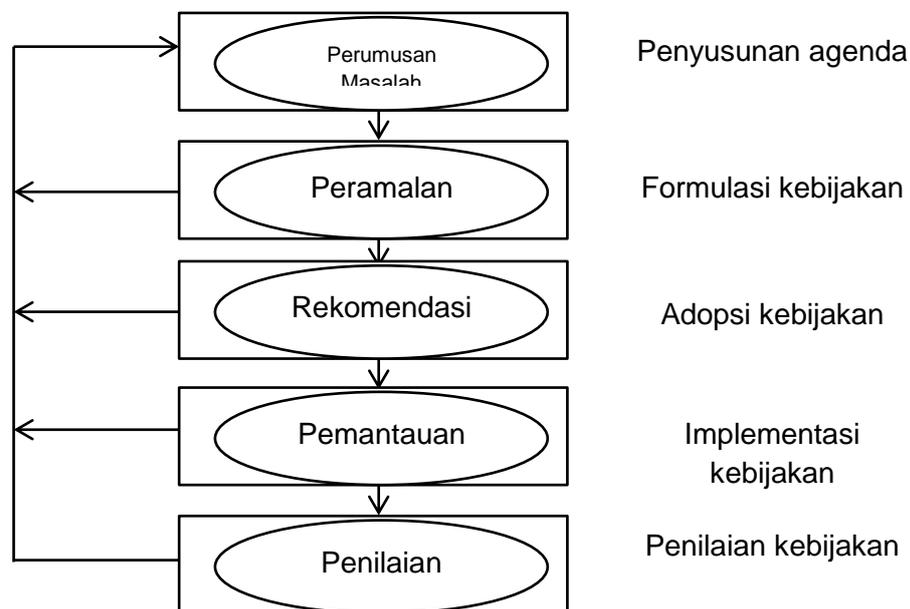
Kebijakan yang telah dilegitimasi kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang telah dialokasikan sumberdaya finansial dan manusia. Tahapan implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja kebijakan tersebut serta apakah kebijakan yang dibuat telah mencapai tujuan yang diharapkan/sesuai atau belum.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian terhadap kebijakan yang meliputi substansi, implementasi serta dampak kebijakan tersebut berdasarkan pada parameter yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Dunn tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1: Tahapan-tahapan kebijakan publik (Dunn, 2003: 25)

4. Model Teori Analisis Kebijakan

a. Analisis kebijakan menurut Weimer-Vining

Analisis kebijakan versi Weimer-Vining dalam Nugroho (2012: 294) meliputi beberapa tahapan analisis meliputi: diagnosis masalah, mengidentifikasi kemungkinan alternatif kebijakan, menilai efisiensi kebijakan yang dikaitkan dengan melakukan perhitungan *cost benefit* kebijakan.

Proses analisis kebijakani terdiri dua tahapan utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Understanding the problem*, mencakup kegiatan *Receiving the problem, assessing symptoms; Framing the problem, analysing market and government failure; Modeling the problem, identifying policy variables.*
- 2) *Choosing and explaining goald and constraints.*
- 3) *Selecting a solution method*
- 4) *Recommending action.*

Berdasarkan analisis kebijakan yang digambarkan oleh Weimer maka dapat diketahui bahwa model analisis ini menitik-beratkan pada analisis biaya dan manfaat pada kebijakan sehingga penganggaran dan manfaat yang akan diperoleh menjadi fokus utama untuk melakukan analisis kebijakan

b. Analisis kebijakan menurut Patton dan Savicky

Analisis kebijakan Patton dan Savicky dalam Nugroho (2012: 359) bahwa sebuah analisis kebijakan dapat dilakukan ketika sebelum maupun sesudah kebijakan itu dibuat. Analisis ini dibagi menjadi dua yaitu secara prediktif dan preskriptif. Analisis prediktif merujuk pada perkiraan akan kondisi pada masa mendatang sebagai hasil adopsi kebijakan. Sedangkan analisis preskriptif sebaga rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Rekomendasi kebijakan yang sifatnya umum dan tidak memberikan fokus tertentu disebut *advis*, sementara rekomendasi yang

menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut *advis* persuasif.

Patton dan Savicky menjelaskan langkah dasar analisis kebijakan yang disebut *a basic policy analysis process* meliputi:

- 1) Kriteria Evaluasi
- 2) Mengidentifikasi Alternatif
- 3) Evaluasi Alternatif Kebijakan
- 4) Menyajikan Alternatif Kebijakan
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan.

D. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta (Nugroho, 2014: 129).

Implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Wahab (2008: 65) bahwa Implementasi adalah pemahaman tentang apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian maupun kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Pelaksanaan atau implementasi menurut Wahab (2008: 14) adalah tindakan yang dilakukan individu atau pejabat tertentu, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang dibuat. Sedangkan Harsono (2002: 67) mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang awalnya berasal dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka untuk menyempurnakan suatu program.

Lebih lanjut, Winarno (2012: 102) menjelaskan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang dilakukan secara terarah guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian Dunn (2003: 132) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan pengendalian terhadap aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih abstrak kedalam bentuk realita. Implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Udoji dalam Mustari (2013: 136) mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Kebijakan tidak berhenti ketika telah disepakati bahkan kebijakan dapat direvisi setelah ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai pada saat pengimplementasiannya. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) menyampaikan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu hasil yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor,

khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Proses implementasi tidak terlepas dalam berbagai kendala yang timbul akibat kerumitan dan kompleksitas didalamnya, kendala ini dapat menjadi hambatan dan menunda keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Setiap masalah memiliki karakteristik dan masalah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011: 94) bahwa karakteristik masalah yang terdiri atas :

- a. Kesulitan Teknis. Tingkat kesulitan teknis berasal dari masalah yang bersangkutan/pelaksana, masalah ini dapat mempengaruhi mudah atau tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen karena tidak mendapatkan kelompok sasaran yang berbeda. Sebaliknya bila kelompok sasaran heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit untuk dilakukan.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Kelompok sasaran program relatif akan sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi yang ada tetapi apabila

sebuah program diimplementasikan pada jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar maka akan relatif mudah.

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Pemberian pengetahuan secara kognitif kepada kelompok sasaran akan memudahkan proses implementasi program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Hogwood dan Gun dalam Wahab (2008: 61-62), menyebutkan syarat agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, antara lain:

- a. Keadaan eksternal organisasi pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius.
- b. Untuk melaksanakan program dengan baik harus memiliki waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- c. Sumber-sumber yang diperlukan harus tersedia secara utuh.
- d. Kebijaksanaan yang diimplementasikan didasari pada suatu hubungan secara kausal.
- e. Hubungan kausal yang terbangun bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Ketergantungan hubungan harus kecil.
- g. Pemahaman secara mendalam terhadap tujuan.
- h. Tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tetap dan sesuai.
- i. Komunikasi dan koordinasi harus sesering dilakukan.
- j. Pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sesuai.

Sebuah implementasi agar efektif tidak hanya memerlukan syarat tetapi juga memerlukan ketepatan, Nugroho (2014: 650) merinci prinsip ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hak keefektifan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketepatan kebijakan. Apakah kebijakannya yang dibuat sudah tepat. Ketepatan kebijakan dapat dinilai dalam muatannya dan sejauh mana kebijakan tersebut memecahkan masalah yang hendak diselesaikan.
- b. Ketepatan pelaksanaan. Ketepatan pelaksana atau aktor implementasi kebijakan yang hendak dilaksanakan. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang diswastakan.
- c. Ketepatan target. Ketepatan target berkaitan dengan tiga hal yaitu pertama, apakah target sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih dengan intervensi target lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua kesiapan target untuk diintervensi, ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau pembaharuan implementasi kebijakan sebelumnya.
- d. Ketepatan Lingkungan. Terdiri atas dua yaitu lingkungan kebijakan yaitu mengenai interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Serta

lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi publik atas kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat, dan individu-individu tertentu yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan publik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Teori George C. Edward

Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi (Widodo 2010: 96-110). Keempat faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan implementor untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga terjadi pengurangan distorsii implementasi. George c. Edward III membahas tiga hal yang utama dalam proses komunikasi kebijakan yaitu :

- a) Transmisi : pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang disampaikan harus

akurat dan mudah dimengerti tentang apa yang menjadi tujuan dan sasaran atau target.

b) Kejelasan

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya diperoleh oleh para pelaksana, tetapi komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan komunikasi berdampak pada implementasi kebijakan dan akan menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.

c) Konsistensi

komunikasi yang disampaikan harus konsisten dan jelas sehingga perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan kepada kelompok sasaran tetapi jika perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2) Sumberdaya,

Isi kebijakan yang telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tidak dapat berjalan dengan baik apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi salah satunya disebabkan oleh karena staf yang dimiliki tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan kecukupan staf, keahlian dan kemampuan yang diperlukan di dalam mengimplementasikan kebijakan.

b) Informasi

Informasi adalah sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan ataupun pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.

c) Kewenangan

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah di dalamnya dapat dilaksanakan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan berkaitan dengan hal yang diamanatkan oleh kebijakan.

d) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

3) Disposisi,

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor yang meliputi komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi,

Struktur organisasi yang bertugas melakukan implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93) tidak terlepas oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan

kelompok sasaran atau *target group* termuat di dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, perubahan yang diinginkan sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

a) *Interest affected* (kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Indikator ini menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang dikaji lebih lanjut.

b) *Type of benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan serta memberikan gambaran bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa jenis manfaat serta dapat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) ini menjelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan, sehingga bagian ini mengharuskan penjelasan tentang letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan.

e) *Program implementor* (pelaksana program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program tidak hanya membutuhkan kejelasan program tapi harus juga didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f) *Resources committed* (sumber daya yang digunakan)

Sebuah program harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya manusia maupun finansial yang sesuai.

2) Lingkungan implementasi (*context of implementation*) meliputi:

a) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan mempengaruhi kebijakan yang dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

b) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon para pelaksana, maka pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011: 94) terdapat tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure*

implementation) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

- 1) Karakteristik masalah (*tractability of the problems*), meliputi:
 - a) Tingkat kesulitan teknis masalah yang bersangkutan
 - b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), meliputi:
 - a) Kejelasan isi mengenai kebijakan.
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan.
 - d) Seberapa besar keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan pada badan pelaksana.
 - f) Tingkat komitmen aparat mengenai tujuan kebijakan.
 - g) Seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), meliputi:
 - a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b) Dukungan publik mengenai sebuah kebijakan

- c) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*)
- d) Tingkat komitmen dan keterampilan aparat dan implementor.

d. Teori Donald S. Van Meter dan dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam Suratman (2017: 83-84) ada enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor.

Keenam variabel tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Implementasi kebijakan hanya dapat diukur apabila ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan kemampuan level pelaksana sehingga kebijakan tidak sulit untuk dilaksanakan. Aktualisasi kebijakan disebut sesuai jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau utopis maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik tersebut.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kemampuan lembaga/badan pelaksana memberdayakan sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran merupakan elemen dalam implementasi kebijakan karena elemen tersebut saling

melengkapi serta mempengaruhi keberhasilan proses implementasi

- 3) Karakteristik Agen Pelaksana. Fokus perhatian agen pelaksana terletak pada organisasi formal maupun informal yang meliputi karakteristik, pola dan hubungan di dalam organisasi tersebut karena kinerja implementasi dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Pelaksana. Hal ini menjadi penting karena proses perumusan kebijakan bukan merupakan formulasi yang disepakati oleh masyarakat yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi akan tetapi seringkali kebijakan yang ada bersifat *top-down* sehingga dapat menimbulkan penolakan. Tanggapan pelaksana yang berpotensi dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.
- 5) Komunikasi Antar Organisasi. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi yang terlibat di dalam proses implementasi. Koordinasi merupakan tindakan komunikatif yang dilakukan antar organisasi sehingga menjadi mekanisme yang ampuh di dalam implementasi kebijakan publik. Semakin sering

dilakukan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat pada proses implementasi, maka akan mengurangi dan menetralsir berbagai kemungkinan kesalahan yang dapat ditimbulkan dan begitu pula sebaliknya. Hubungan antar organisasi dapat dilaksanakan dengan memberikan masukan dan bantuan teknis antar organisasi serta membuat kesepakatan yang didasari atas kebijakan yang dapat menghasilkan sanksi positif atau negatif.

- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal ini merupakan pengaruh-pengaruh lingkungan eksternal yang dapat mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn menawarkan sejauhmana lingkungan eksternal dapat mendorong dan membantu keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan, yang diperhatikan adalah kondisi lingkungan eksternal. Hipotesis yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik pada organisasi pelaksana dapat memberikan pengaruh terhadap karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan perilaku para pelaksana dan pencapaian itu sendiri.

e. Teori Ripley dan Franklin

Implementasi menurut Ripley dan Franklin merupakan apa saja yang terjadi sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan baik dalam otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Winarno, 2012: 148). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh birokrasi atau pejabat pemerintah. Implementasi meliputi tindakan berbagai aktor yang dimaksud untuk membuat program berjalan sebaik mungkin.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 149) dapat dilihat pada tiga aspek yang meliputi: (1) kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana di atur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta (3) pelaksanaan dan dampak manfaat yang dikehendaki pada semua program dilakukan dengan terarah.

Ripley dan Franklin memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini menfokuskan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu. Perspektif kepatuhan merupakan analisa karakter dan kualitas perilaku organisasi. Ripley dan Franklin menyebutkan paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan yaitu :

- 1) Banyak faktor selain birokrasi yang berpengaruh tetapi justru kurang mendapatkan perhatian.
- 2) Adanya program yang tidak didesain dengan baik dan benar.

Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang memiliki maksud bahwa terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dielaborasi berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dinyatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat program antara lain cara pelaksana, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan perspektif hasil program dapat dinilai berhasil jika program membawa dampak seperti yang apa diinginkan, suatu program mungkin tidak berhasil apabila dilihat berdasarkan proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau begitupun sebaliknya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Kebijakan tidak serta merta dapat berjalan dengan baik, terdapat faktor yang dapat mendukung maupun menghambat kebijakan tersebut. Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010: 59) menyampaikan tentang keberhasilan dan kegagalan implementasi yang disebabkan oleh tiga faktor umum sebagai berikut:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu seberapa besar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yakni apakah keseluruhan pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu *assembling* produktif yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai serta memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Sementara Gow dan Morss dalam Pasolong (2010: 59) menyebutkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang meliputi: hambatan politik; ekonomi dan lingkungan; kelemahan institusi; ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif; kekurangan dalam bentuk teknis; kurangnya desentralisasi dan partisipasi; pengaturan waktu; dan sistem informasi.

E. Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian hanya bisa dilakukan apabila terdapat penelitian terdahulu yang dapat mendukung atau menunjang pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Tesis

No.	Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Solichin (2015)	Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi	Kebijakan politik dan birokrasi merupakan dua hal paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Peran birokrasi di lembaga pendidikan menjadi puncak model implementasi kebijakan, oleh karenanya diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan pendidikan. Proses pembaharuan tersebut berkaitan dengan pengembangan, penyebaran, diseminasi, perencanaan adopsi, dan penerapan kebijakan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada perbaikan bidang pendidikan
2	Susilawati (2017)	Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Budaya Di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya di Desa Pagerharjo Kabupaten Kulon Progo, belum dimanajemen secara terperinci seperti pelaksanaannya, keuangan, sarana prasarana dan prosedur kerja. Implementasi kebijakan baru himbauan pemerintah desa kemudian diaplikasikan langsung oleh masyarakat. pengaplikasiannya melalui sosialisasi, pemberian contoh, pembiasaan, kegiatan sosial budaya. Pelaksanaan progam meliputi: a) komunikasi melalui sosialisasi dan koordinasi perangkat desa, dusun dan organisasi masyarakat; b) sumber daya manusia, dana, dan sarana.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada aspek budaya tetapi melihat aspek eksternal lainnya

No.	Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>prasarana tersedia; c) disposisi atau respon masyarakat positif; d) struktur birokrasi ada dan terlibat dalam program kegiatan. 2) faktor pendukung: tujuan bersama, adanya pemahaman pendidikan berbasis budaya, ada program kegiatan penunjang, organisasi masyarakat, partisipasi dan sarana prasarana. Faktor penghambat: partisipasi musiman, orientasi pada keuntungan, belum ada pedoman pelaksanaan, serta pengaruh negatif arus global dan kemajuan teknologi.</p>		
3	Dahlan (2013)	Kebijakan Pendidikan Gratis Di Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang	Dalam penyusunan kebijakan pendidikan gratis proses konsultasi terhadap stakeholders pendidikan di Kabupaten Rembang tidak dilakukan dengan maksimal. Akibatnya adalah proses implementasi kebijakan pendidikan gratis mengalami berbagai kendala.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang dilakukan tidak melihat pelaksanaan pendidikan gratis melainkan perbaikan yang dilakukan dalam bidang pendidikan
4	Hamid (2015)	Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara	Hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terlaksana baik dari sasaran pendidikan gratis, peran serta masyarakat, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sudah berjalan namun belum optimal terlihat dari masih banyak anak yang tidak sekolah yang belum terakomodir dengan baik dan masih banyak yang perlu dibenahi.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang dilakukan tidak melihat pelaksanaan pendidikan gratis melainkan perbaikan yang dilakukan dalam bidang pendidikan
5	Asyiah <i>et al.</i> , (2018)	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman	Bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman cukup baik, dapat dilihat dari komunikasi yang kurang efektif kepada sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia sudah cukup optimal untuk melaksanakan kebijakan, walaupun masih ada kekurangan dalam sumber daya anggaran untuk pengembangan sekolah dan siswa, sikap	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan untuk melihat pelaksanaan program <i>MAPPADDECENG</i> dalam bidang pendidikan

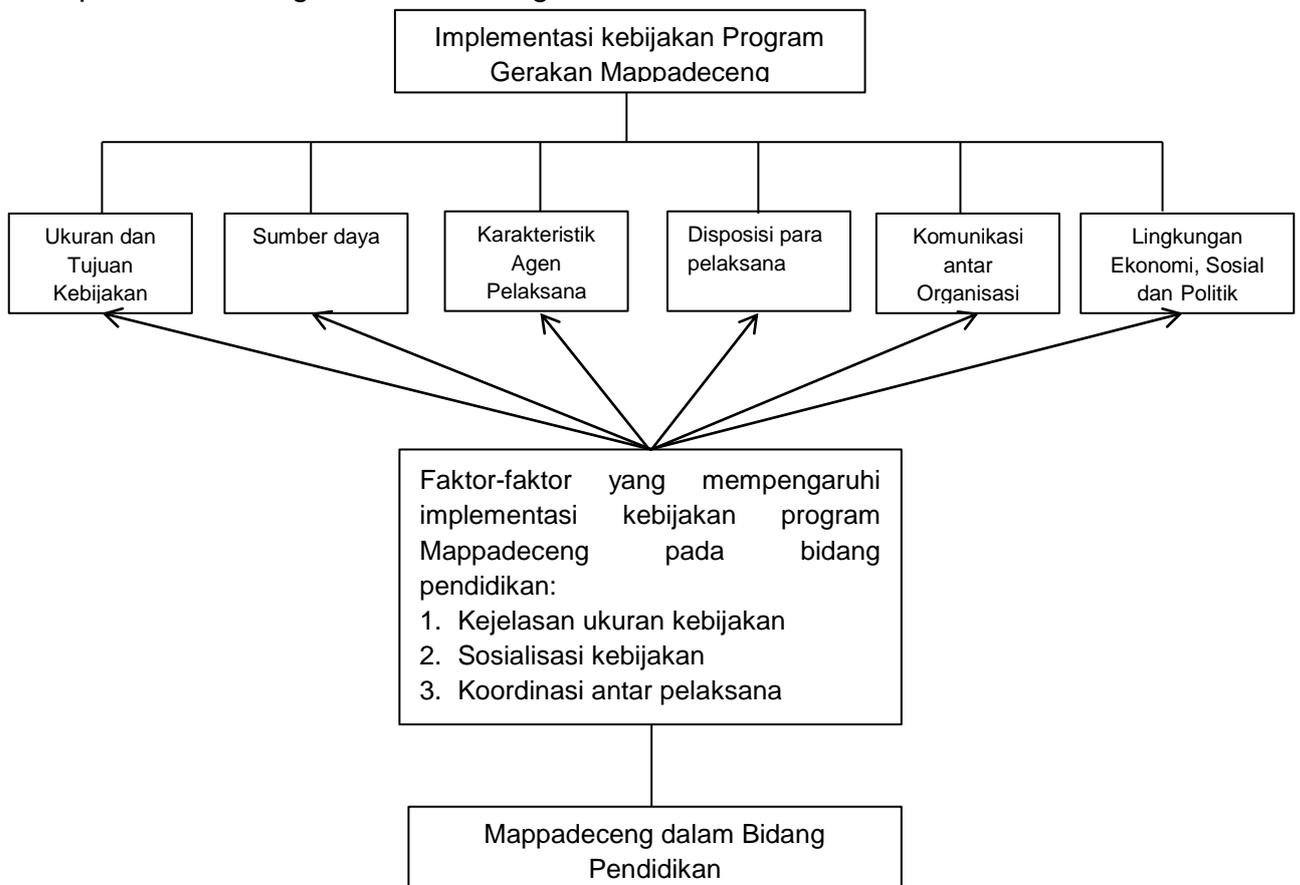
No.	Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
			pelaksana kebijakan cukup baik namun, ada sekolah yang meminta pungutan, dan dalam struktur birokrasi cukup sederhana namun belum memiliki SOP yang jelas. Capaian implementasi kebijakan pendidikan gratis sudah efektif dan efisien yaitu sudah tercapainya tujuan kebijakan dengan penggunaan dana yang optimal untuk pelaksanaan kebijakan, Kebijakan pendidikan gratis cukup memuaskan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan, pelaksanaan pendidikan gratis sudah merata, masyarakat mendukung pelaksanaan pendidikan gratis, Pendidikan Gratis tepat untuk dilaksanakan di Kabupaten Pasaman.		
6	Abuya <i>et al.</i> , (2015)	Implementasi Pendidikan Dasar Gratis di Kenya: Peran Guru Sekolah Dasar Mengatasi Gap Kebijakan	Tidak ada studi empiris yang memadai untuk mendukung pandangan dan pernyataan tentang pengalaman guru dan motivasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang universal di Kenya.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada pendidikan dasar melainkan melihat pelaksanaan program <i>MAPPADECENG</i> dalam bidang pendidikan
7	Mulina <i>et al.</i> , (2015)	Kebijakan Pendidikan Dasar Gratis: Strategi Coping di Sekolah Dasar Umum di Kabupaten Kakamega Selatan, Kenya	Kebijakan pendidikan dasar gratis telah menyebabkan peningkatan eksponensial dalam jumlah anak-anak mendaftar di sekolah dasar, ini telah lebih menggeliat manusia yang tersedia dan sumber daya fisik untuk mengatasi angka-angka ini. Hal ini telah menyebabkan dalam strategi pengajaran yang buruk dihasilkan dalam kinerja akademis yang buruk di Kenya Sertifikat Pendidikan Dasar (KCPE) Pemeriksaan. Strategi Coping utama termasuk mempekerjakan guru ekstra yang dibayarkan oleh orang tua melalui komite manajemen sekolah untuk melengkapi mereka diposting oleh Guru Jasa Komisi (TSC) serta memberikan insentif material dan keuangan untuk guru untuk memungkinkan mereka pergi mil ekstra dan mengajarkan lagi jam di luar direkomendasikan beban kerja.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Memiliki fokus penelitian yang berbeda

No.	Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
8	Mashala (2019)	Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah di Tanzania	Penerapan kebijakan pendidikan menengah gratis adalah yang paling bijaksana. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2015, Kebijakan Pendidikan Gratis pada banyak bidang telah menemukan sedikit dampak pada pendidikan menengah di Tanzania. Studi ini, bagaimanapun, menginformasikan pemerintah untuk melakukan lebih banyak upaya untuk secara efektif mengimplementasikan janji-janji kebijakan tanpa mengurangi kualitas pendidikan.	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan hanya melihat pelaksanaan perbaikan dalam bidang pendidikan
9	Hasana h et al.,(2019)	Implementasi Program Pendidikan Gratis di Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program pendidikan gratis di Mts Syamsul Arifin dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan sekolah. Itu bisa dilihat dari kenaikan gaji guru dari sebelumnya dan kemampuan membeli fasilitas belajar dalam bentuk LCD dan proyektor	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada pendidikan dasar melainkan melihat pelaksanaan program <i>MAPPADECENG</i> dalam bidang pendidikan
10	Zuilkowski et al., (2019)	"Tidak Ada Pendidikan Gratis saat ini": Penjelasan Pemuda Tentang Putus Sekolah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tinggi untuk sekolah menengah adalah alasan utama putus sekolah, dengan sebagian anak laki-laki juga melaporkan masalah perilaku sebagai faktor yang berkontribusi. Sementara biaya mempengaruhi remaja laki-laki dan perempuan secara setara, pilihan yang dihadapi setelah dropout sangat berbeda. Temuan menunjukkan perlunya jalur yang lebih mudah kembali ke pendidikan formal untuk pemuda yang putus sekolah	Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan	Penelitian yang dilakukan tidak mengkaji alasan peserta didik putus sekolah

Sumber: Berbagai hasil penelitian

F. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan program gerakan Mappadaceng yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng di dalam bidang pendidikan dan yang menjadi *leading sector* adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, peneliti menggunakan *A Model of the Policy Implementation* oleh Van Meter dan Van Horn (1975) maka untuk melihat implementasi dan faktor yang mempengaruhi kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir